

## ABSTRAK

Otonomi daerah yang diselenggarakan semakin memberikan peluang bagi daerah-daerah di Indonesia untuk bersaing memajukan daerahnya dengan mengandalkan potensi daerah masing-masing. Oleh karena itu salah satu bentuk perhatian dari Pemerintah Pusat yaitu dengan adanya Alokasi Dana Desa sebagai bantuan keuangan yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan juga meningkatkan kinerja pemerintah desa. Pada pelaksanaannya masih saja terdapat banyak penyimpangan penggunaan dana Alokasi Dana Desa sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk kemajuan desa justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Maka dari itu yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pengawasan yang lebih dalam penggunaan dana ADD ini. Pengawasan yang paling dibutuhkan yaitu dari partisipasi masyarakat yang diharapkan akan meningkatkan kualitas penggunaan dana ADD. Penelitian ini dilakukan di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Desa Panjunan dipilih karena merupakan salah satu desa yang menerima dana ADD terbesar dan menjadi perhatian dari Pemerintah Pusat karena dilihat yang paling terlihat kemajuannya dan pada saat penelitian ini dilakukan sedang dalam masa transisi yang menuntut pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan pada situasi ini. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengawasan program ADD di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pihak-pihak yang dianggap mengerti dan memahami pengawasan pada program ADD di Desa Panjunan. Kemudian karena keadaan di lapangan yang memungkinkan agar peneliti juga menggunakan teknik snowball sampling.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan pada program ADD di Desa Panjunan sudah dilaksanakan dalam tiga tahapan pengawasan yaitu menentukan standart (perencanaan), pengukuran pelaksanaan program, dan evaluasi program disertai identifikasi terhadap penyimpangan yang terjadi sekaligus menghasilkan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi. Jenis pengawasan yang dilakukan adalah teknis, administrasi, masyarakat dan pengawasan eksternal. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program ADD di Desa Panjunan ini sudah dilakukan pada ketiga tahap pengawasan tersebut. Partisipasi masyarakat di Desa Panjunan tersebut masuk dalam level consultation dan termasuk dalam derajat tokenism sesuai dengan teori level partisipasi dari Sherry A. Arnstein. Yaitu masyarakat sudah memberikan masukan sebagai bentuk pengaruhnya namun keputusan tetap ada di Pemerintah Desa.

Kata kunci : partisipasi masyarakat, pengawasan program ADD, pembangunan desa